

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pemekaran wilayah terhadap pendapatan di Kabupaten/Kota yang melakukan pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pemekaran wilayah terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota yang melakukan pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Barat.
3. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum pemekaran lebih rendah dibandingkan dengan setelah adanya pemekaran wilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Dapat disimpulkan bahwa setelah adanya pemekaran wilayah kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat berkurang.

6.2 Saran

1. Perlu adanya perumusan ulang kebijakan pemekaran yang tidak semata terbatas pada perumusan pasal-pasal yang terkait dengan kelayakan, dan proses pemekaran tetapi juga kebijakan yang mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Karena dengan melakukan pemekaran membutuhkan biaya ekonomi dan politik yang mahal, artinya, perlu dirumuskan kebijakan alternatif diluar pemekaran yang bisa memenuhi tuntutan masyarakat.
2. Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk menentukan pemekaran ataupun penggabungan atas dasar informasi yang komprehensif

tentang implikasi positif dan negatif pemekaran daerah bagi pelayanan publik.

- 3) Jika kinerja perekonomian maupun keuangan daerah otonom baru cenderung menurun, perlu adanya kebijakan penggabungan kembali dengan daerah induk, atau penggabungan dengan DOB yang lain. Selain itu jika keinginan untuk pemekaran daerah yang dimotivasi oleh tuntutan pembangunan ekonomi di suatu wilayah, pemerintah bisa mengikapinya dengan pemerataan pembangunan ekonomi, atau bila sesuai dengan parameter yang ada, dengan menetapkannya sebagai kawasan khusus dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih fokus untuk melaksanakan pembangunan di daerah yang dimaksud.



